

LAPORAN
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR HASAMITRA
TAHUN 2024



Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No 5-6, Makassar.
TELEPON: (0411) 3652000

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR Hasamitra
Alamat	Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No 5-6, Makassar
Nomor Telepon	(0411) 3652000

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan termasuk Bank Perekonomian Rakyat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah menjadi instrument penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha yang dijalankan telah dilaksanakan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Menjadi komitmen Pengurus BPR Hasa Mitra untuk menjalankan aktifitas usahanya selalu tunduk pada tata aturan yang berlaku dan berusaha menjalankan prinsip tata kelola yang dimaksudkan dalam POJK diatas. Wujud komitmen tersebut selanjutnya kami sampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Hasamitra tahun 2024 sekaligus memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
---	---------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen PT BPR Hasamitra telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen PT BPR Hasamitra.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	I Nyoman Supartha
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
a. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) maupun jangka panjang Perseroan untuk disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan		

perundang-undangan yang berlaku.

- b. Menjalankan usaha perseroan sesuai tugas, kewenangan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dalam rangka mewujudkan visi dan misi perseroan, dengan tata kelola yang baik.
- c. Memberikan kuasa kepada tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan/ atau kepada pegawai dan atau Struktur Pendukung Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap pada Direksi.
- d. Merumuskan dan menetapkan tata tertib dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja (Board Manual) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
- e. Merumuskan kebijakan pengelolaan risiko yang mampu mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta didukung oleh kerangka kerja yang memungkinkan adanya proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen risiko.
- f. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perseroan.
- g. Berhak dan berwenang serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam hal ini upaya- upaya pengembangan bisnis dan informasi teknologi.
- h. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.
- i. Menyusun laporan tahunan yang kegiatan usaha Perseroan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

2. Nama

I Made Semadi

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Membantu Direktur Utama dalam bidang bisnis baik dari sisi penghimpunan pendanaan ataupun penyaluran kredit dan pengembangan perusahaan dalam konteks ekspansif dan pengembangan system teknologi informasi.
- b. Melaksanakan prinsip- prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas usaha di Bank telah mempertimbangkan risiko-risiko yang berpotensi dapat terjadi.
- d. Menetapkan pedoman dan kebijakan pengelolaan risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi kredit dan risk appetite Bank.
- e. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili perseroan dalam menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga lain serta memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat/nasabah.
- f. Melakukan negosiasi langsung dengan pihak ketiga dalam rangka penetapan tingkat margin bunga baik penghimpunan dana dan penyaluran kredit berdasarkan ketentuan dan kewenangan dalam rangka pengembangan pasar serta melaporkannya kepada Direktur Utama serta Komisaris.
- g. Menangani aspek kepatuhan pada regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga lain agar tercapai tingkat kualitas kesehatan bank secara berkesinambungan.
- h. Menetapkan dan memantau Rencana Kerja jangka pendek maupun jangka panjang agar sasaran/arah strategi dan kebijakan kredit, anggaran

- dan rencana kerja dapat tercapai dan terukur, kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Komisaris dan pemegang saham.
- i. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam Rencana Bisnis Bank dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.
 - j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta wajib memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
 - k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama serta ikut hadir dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

3.	Nama	Muhammad Dahlan
----	-------------	-----------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Menyusun pedoman kerja, system, prosedur dan kode etik kepatuhan.
- c. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Hasa Mitra telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang- undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
- d. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
- e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- f. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai BPR.
- g. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.
- h. Merumuskan konsep dan strategi dalam rangka membangun budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi perusahaan.
- i. Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala.
- j. Menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/ atau Keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
- k. Memantau dan memastikan penyelesaian komitmen yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau lembaga lainnya

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Setiap rekomendasi dewan komisaris di tahun 2024 telah di tindaklanjuti dan dilaporkan pada setiap rapat yang dilaksanakan baik itu rapat pengurus maupun rapat pimpinan.

Semua Direksi telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Direksi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan kualifikasi Kompten Direktur Tingkat 2 menunjukkan yang bersangkutan berkompeten menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi. Ketiganya adalah mantan praktisi perbankan di Bank

Umum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mengelola perusahaan secara professional, akuntabel dan independent. Direksi maupun Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan antara satu dengan yang lainnya termasuk dengan pemegang saham yang dapat berpengaruh pada kemampuannya bertindak profesional dan independen.

Selain itu kelangsungan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik karena intensitas kehadiran Direksi pada setiap hari kerja. Domisili Anggota Direksi sangat terjangkau ke Kantor Pusat BPR yang berada ditengah Kota Makassar yakni di Jalan Doktor Wahidin Sudirohusodo No. 5-6 Pusat Pertokoan Makassar, masing- masing 2 (dua) orang Direksi berdomisili di Kota Makassar dan 1 (satu) Direksi berdomisili di Sungguminasa Kabupaten Gowa yang berjarak sekitar 12 (dua belas) kilometer dari Kantor BPR Hasamitra.

Meskipun Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang berbeda, namun koordinasi antara satu dengan yang lainnya dalam rangka membangun sinergitas dan harmonisasi kerja berjalan dengan baik. Bentuk koordinasi yang dimaksudkan antara lain melalui rapat- rapat resmi bulanan/ mingguan atau insidentil (sifatnya kondisional), koordinasi secara informal ditingkat bagian, lintas bagian baik langsung maupun melalui virtual zoom atau media komunikasi Whats App Group (WAG) dan Telegram.

Direksi juga terlibat aktif melakukan pemantauan berdasarkan laporan kinerja harian sebagai bentuk keterlibatan sekaligus pengawasan yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, kelancaran operasional, termasuk diskusi case atas permasalahan ataupun hal penting lainnya yang membutuhkan pendapat dari manajemen.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Yonggris
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.	
	b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.	
	e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap	

BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

2.	Nama	Andi faisal Husni
----	-------------	-------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.
- b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
- e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

3.	Nama	Livinus Rantelino
----	-------------	-------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.
- b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

- e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.**

Rekomendasi Kepada Direksi:

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris telah disampaikan disetiap rapat pengurus dan/ atau rapat pimpinan serta hasil rekomendasi itu telah ditindaklanjuti oleh direksi (jika ada).

Secara umum fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris termasuk didalamnya pengawasan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko berjalan secara baik. Intensitas kehadiran berkantor di setiap hari kerja. Dewan Komisaris aktif memantau pertumbuhan indikator penting usaha BPR antara lain pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, peningkatan biaya, dan besaran pendapatan termasuk memperhatikan indicator pengukuran Tingkat Kesehatan BPR dari Tata Kelola, Profil Risiko, Rasio Permodalan dan Rasio Earning berdasarkan laporan keuangan hasamitra. Dewan Komisaris aktif melakukan pencermatan perkembangan bisnis perusahaan dan issue- issue yang berpengaruh serta aktif memantau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI atau pihak eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memastikan pemenuhan komitmen atas hasil temuan tersebut. Dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) komite yakni Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Komite Remunerasi dan Nominasi baru terbentuk di awal tahun 2025. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kehadiran Dewan Komisaris relatif sama dengan intensitas kehadiran Direksi yakni disetiap hari kerja kecuali hari Sabtu

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

1.	Komite	01. Komite Audit
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	a. Mengevaluasi kecukupan rencana kerja audit jangka panjang dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). b. Memantau bahwa dalam melaksanakan tugasnya, SKAI tidak mendapat larangan atau pembatasan. c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil audit termasuk kertas kerja audit (bila diperlukan) dan kinerja SKAI. d. Memonitor realisasi rencana kerja audit tahunan. e. Memantau bahwa SKAI telah menjalankan fungsi audit dengan objektif, independen, dan memenuhi standar profesional yang berlaku. f. Mengevaluasi kecukupan metodologi audit SKAI, sekurang- kurangnya satu kali dalam masa jabatannya, serta mengusulkan kepada SKAI untuk memperbaharui apabila diperlukan.

	<ul style="list-style-type: none"> g. Mengevaluasi bahwa SKAI memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi pedoman audit intern dan melaksanakan rencana audit tahunan maupun jangka panjang. h. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). i. Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan. j. Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan audit laporan keuangan. k. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku. l. Memastikan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit dan management letter kepada BPR tepat waktu. m. Mengkaji tambahan cakupan audit yang diajukan BPR atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. n. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan akuntan publik, hasil pengawasan OJK maupun regulator lainnya. o. Pengendalian intern dan laporan keuangan; dan Penerapan Tata Kelola.
Jumlah Rapat	3

Program Kerja Komite:

- a. **Evaluasi rencana kerja tahunan SKAI**
- b. **Memantau bahwa SKAI tidak dibatasi dalam melaksanakan tugasnya**
- c. **evaluasi realisasi rencana kerja SKAI Tahun 2023**
- d. **Mengevaluasi sumber daya SKAI**
- e. **Memantau tindak lanjut temuan SKAI**
- f. **Evaluasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan BPR Tahun buku 2023**
- g. **Merekomendasikan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan BPR Tahun Buku 2024**
- h. **Memantau Pelaksanaan tindak lanjut Direksi terhadap temuan Auditor Eksternal (KAP, OJK, dan Regulator Lainnya)**
- i. **menelaah dan mengevaluasi laporan keuangan dan ratio tingkat kesehatan BOR**
- j. **mengevaluasi efektivitas pengendalian intern melalui hasil temuan SKAI maupun auditor eksternal**
- k. **memantau dan memastikan penerapan tata kelola BPR sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan.**

Realisasi Program Kerja Komite:

- a. Secara Triwulan, Komite Audit mengadakan rapat bersama dengan Divisi Satuan Kerja Audit Internal dengan melakukan Evaluasi realisasi atas kerja tahunan SKAI
- b. Komite Audit Turut serta dalam melakukan evaluasi sumber daya SKAI
- c. Setiap Bulan SKAI menyampaikan realisasi tindaklanjut hasil temuan SKAI
- d. Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite sebanyak 3 (tiga) kali dalam periode tahun 2024 masing-masing pada tanggal 2 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Oktober 2024
- e. Merekomendasikan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan BPR Tahun Buku 2023 di Bulan Juni 2024
- f. Setiap Triwulan mengevaluasi laporan keuangan dan ratio tingkat kesehatan BPR dan disampaikan kepada direksi

2.	Komite	02. Komite Pemantau Risiko
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik. b. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko dan kebijakan lain terkait risiko yang telah disusun oleh Direksi, serta memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan BPR yang ditetapkan oleh Direksi dalam bidang manajemen risiko. d. Memberikan evaluasi terhadap tanggapan dari pemeriksa/ pengawas OJK atau regulator terhadap Dewan Komisaris terkait Manajemen risiko. e. Melakukan telaah dan memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan umum perkreditan BPR yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris. f. Melakukan telaah dan memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan terkait laporan atau permintaan/usulan persetujuan atau hal-hal

	lain yang terkait dengan risiko yang disampaikan oleh Direksi. g. Melakukan kunjungan ke lapangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko jika dibutuhkan. h. Melaksanakan tugas- tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
Jumlah Rapat	3
Program Kerja Komite: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggungjawab manajemen Risiko Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko dan kebijakan lain terkait risiko yang telah disusun oleh direksi Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Per Triwulan 	
Realisasi Program Kerja Komite: <ol style="list-style-type: none"> Komite Pemantau Risiko secara triwulan berkoordinasi dengan Divisi Manajemen risiko dalam mengevaluasi peta risiko korporat Ketua komite pemantau risiko pada tahun 2024 bersama dengan divisi manajemen risiko onsite ke cabang- cabang untuk melakukan sosialisasi terkait dengan risiko yang melekat di cabang-cabang atau di bagian. Dalam Agenda rapat triwulan Komite Pemantau Risiko melakukan pembahasan terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko di BPR Evaluasi atas realisasi RBB dilakukan secara triwulan setiap melakukan rapat komite pemantau risiko. hal ini untuk memitigasi risiko strategik pada BPR. 	

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite sebanyak 3 kali oleh masing-masing Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Daftar Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

1.	Nama Anggota Komite	Livinus Rantelino
	Keahlian	Memiliki latar belakang didunia perbankan sebagai auditor kurang lebih 16 tahun di BII atau yang sekarang kita kenal dengan nama Maybank.
	Jabatan Dalam Komite Audit	01. Ketua Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi

	dan Nominasi	dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	2. Tidak
2.	Nama Anggota Komite	Marthinus Tandiayuk
	Keahlian	1. Memiliki latar belakang didunia perbankan kurang lebih 25 tahun sebagai auditor dan kepala cabang di BII atau yang sekarang kita kenal dengan nama Maybank. 2. Telah lulus sertifikasi management risiko level 1&2.
	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
3.	Nama Anggota Komite	Andi Faisal Husni
	Keahlian	Memiliki latar belakang didunia perbankan kurang lebih 32 tahun di Bank Indonesia.
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	01. Ketua Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	01. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak	2. Tidak

	Independen?	
4.	Nama Anggota Komite	Dr. Paulus Tangke, SE., M.Si. AK.CA
	Keahlian	selama 3 tahun bekerja di dunia perbankan dan merupakan seorang akademisi dari Universitas Atma Jaya Makassar
	Jabatan Dalam Komite Audit	02. Anggota Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
5.	Nama Anggota Komite	A. Rahmawati, SE., M.Si
	Keahlian	merupakan seorang akademisi dari STIEM Bongaya Makassar
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	02. Anggota Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	1. Ya
6.	Nama Anggota Komite	Yonggris
	Keahlian	Merupakan Pendiri BPR Hasamitra tahun 2004 yang masih eksis sampai dengan tahun ini serta merupakan dosen praktisi di Universitas Hasanuddin pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak tahun
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit

	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	2. Tidak
7.	Nama Anggota Komite	Adi Nursyamsu
	Keahlian	merupakan alumni jurusan psikologi Universitas Negeri Makassar yang Memiliki pemahaman Undang-undang ketenagakerjaan terkait remunerasi, tunjangan, dan hubungan industrial.
	Jabatan Dalam Komite Audit	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit
	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko
	Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi	02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
	Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko
	Jabatan Dalam Komite Lainnya	00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya
	Apakah Merupakan Pihak Independen?	2. Tidak

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

BPR Hasamitra telah memenuhi prinsip tata kelola dalam pemenuhan komite yang wajib dibentuk untuk BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dan termasuk pemenuhan jumlah anggota komitennya yang dimana BPR Hasa Mitra telah memiliki komite audit, komite pemantau risiko serta komite Nominasi dan Remunerasi yang masing- masing anggotanya terdiri dari seorang komisaris independen dan 2 pihak independen yang memiliki kompetensi dan/ atau pengalaman dibidang keuangan, akuntansi, hukum atau perbankan. Adapun tugas evaluasi dan analisis yang telah dijalankan masing- masing komite sebagai berikut:

1. Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite Audit sebanyak 3 (tiga) kali dalam periode tahun 2024 masing- masing pada tanggal 2 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Oktober 2024.

2. Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) kali dalam periode tahun 2024 yang dilakukan masing- masing pada tanggal 30 April 2024, 24 Juli 2024, dan 17 Oktober 2024.
3. Sedangkan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi baru dibentuk pada tanggal 09 September 2024. sehingga rencana kerja yang disusun merupakan rencana kerja untuk periode tahun 2025.

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	I Nyoman Supartha
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Made Semadi
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Muhammad Dahlan
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1.	Nama	Yonggris
	Persentase Kepemilikan (%)	93,53
2.	Nama	Andi Faisal Husni
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Livinus Rantelino
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Seluruh anggota direksi BPR Hasamitra tidak sebagai pemegang saham pada BPR Hasamitra. sedangkan Tuan Yonggris selain merupakan komisaris utama, Yang Bersangkutan juga merupakan pemegang saham pengendali pada BPR Hasamitra.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR		
1.	Nama	I Nyoman Supartha
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham

	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	I Made Semadi
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	Muhammad Dahlan
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Yonggris
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Andi faisal Husni
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	Livinus Rantelino
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR (Bukan pada BPR)

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Yonggris
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPR Hasamitra Jawa Barat
	Persentase Kepemilikan (%)	70,00

Seluruh anggota direksi BPR Hasa Mitra tidak memiliki saham pada perusahaan lain. Kepemilikan saham dari salah anggota dewan komisaris pada perusahaan lain tidak mempengaruhi independensi yang bersangkutan pada BPR Hasamitra.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I Nyoman Supartha
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Made Semadi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan	Tidak ada

	Pemegang Saham Lain di BPR	
3.	Nama	Muhammad Dahlan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Yonggris
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Andi faisal Husni
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Livinus Rantelino
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keuangan satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota komisaris dan pemegang saham.

Seluruh anggota komisaris tidak memiliki hubungan keuangan satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota direksi dan pemegang saham.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I Nyoman Supartha
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Made Semadi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Muhammad Dahlan
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1.	Nama	Yonggris
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Almarhum Harianto - Ayah dari Komisaris Utama
2.	Nama	Andi faisal Husni
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Livinus Rantelino
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR		
1.	Nama	Yonggris
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Almarhum Harianto - Ayah dari Komisaris Utama

2.	Nama	Hariato
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Yonggris - Anak
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Yonggris - Anak

Seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya begitu pula dengan anggota komisaris dan pemegang saham.

Seluruh anggota komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi tetapi salah satu anggota komisaris yaitu komisaris utama yang juga bertindak sebagai pemegang saham pengendali memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp. 5.348.862.257
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp. 2.088.827.219

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp. 205.739.650
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp. 44.554.964

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp. 1.171.061.120
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp. 445.412.656

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	3 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp. 64.346.000
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	3 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp. 20.246.000

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	3 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp. 105.103.950
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	3 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp. 22.116.264

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	3 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp. 53.569.700
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	3 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp. 19.472.700

Pemberian gaji, tunjangan dan tantiem kepada dewan komisaris dan dewan direksi berdasarkan hasil keputusan RUPS.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	4,28 : 1
--------------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,28 : 1
--------------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,49 : 1
--------------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,01 : 1
--------------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	3,54 : 1
--------------------	----------

Perbandingan rasio gaji tertinggi dan gaji terendah masih relatif normal.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	26 Maret 2024
	Jumlah Peserta	6 orang

	Topik/Materi Pembahasan: 1. Tindaklanjut Komitmen Rapat Pengurus tgl 23 Okt 2023 2. Revisi RBB Th 2024 3. RUPS April 2024 4. Lainnya				
2.	<table border="1"> <tr> <td>Tanggal Rapat</td> <td>27 Juni 2024</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Peserta</td> <td>6 orang</td> </tr> </table> Topik/Materi Pembahasan: 1. Tindaklanjut Komitmen Rapat Pengurus tgl 26 Maret 2024 2. Evaluasi RBB Th 2024 3. Evaluasi kinerja cab pangkep, sidrap, wajo dan bulukumba 4. Obligasi 5. Lainnya	Tanggal Rapat	27 Juni 2024	Jumlah Peserta	6 orang
Tanggal Rapat	27 Juni 2024				
Jumlah Peserta	6 orang				
3.	<table border="1"> <tr> <td>Tanggal Rapat</td> <td>16 Oktober 2024</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Peserta</td> <td>6 orang</td> </tr> </table> Topik/Materi Pembahasan: 1. Tindaklanjut komitmen rapat pengurus tgl 27 Juni 2024 2. Evaluasi kinerja tw 3 th 2024 3. Raker th 2024 4. Expo Hasamitra dalam rangka hut 19 5. Lainnya	Tanggal Rapat	16 Oktober 2024	Jumlah Peserta	6 orang
Tanggal Rapat	16 Oktober 2024				
Jumlah Peserta	6 orang				
4.	<table border="1"> <tr> <td>Tanggal Rapat</td> <td>31 Oktober 2024</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Peserta</td> <td>6 orang</td> </tr> </table> Topik/Materi Pembahasan: 1. Rencana keberlanjutan kerjasama PT Teradata Megah 2. Lainnya	Tanggal Rapat	31 Oktober 2024	Jumlah Peserta	6 orang
Tanggal Rapat	31 Oktober 2024				
Jumlah Peserta	6 orang				
5.	<table border="1"> <tr> <td>Tanggal Rapat</td> <td>03 Januari 2024</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Peserta</td> <td>4 orang</td> </tr> </table> Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi Rapat Dewan Komisaris 08 Desember 2023 2. Penetapan Gaji Dewan Direksi dan Komisaris untuk tahun 2024 3. Lainnya	Tanggal Rapat	03 Januari 2024	Jumlah Peserta	4 orang
Tanggal Rapat	03 Januari 2024				
Jumlah Peserta	4 orang				
6.	<table border="1"> <tr> <td>Tanggal Rapat</td> <td>03 April 2024</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Peserta</td> <td>3 orang</td> </tr> </table> Topik/Materi Pembahasan:	Tanggal Rapat	03 April 2024	Jumlah Peserta	3 orang
Tanggal Rapat	03 April 2024				
Jumlah Peserta	3 orang				

	1. Evaluasi Rapat Dewan Komisaris 03 Januari 2024 2. Evaluasi Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2024 3. Lainnya
7.	Tanggal Rapat 23 Juli 2024 Jumlah Peserta 3 orang Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi Rapat Komisaris 03 April 2024 2. Evaluasi Pengawasan Komisaris Semester I Tahun 2024 3. Lainnya
8.	Tanggal Rapat 28 Agustus 2024 Jumlah Peserta 3 orang Topik/Materi Pembahasan: 1. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi 2. Lainnya
9.	Tanggal Rapat 07 Oktober 2024 Jumlah Peserta 3 orang Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi Rapat Komisaris 28 Agustus 2024 2. Evaluasi Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan 3 Tahun 2024 3. Lainnya
10.	Tanggal Rapat 18 Desember 2024 Jumlah Peserta 3 orang Topik/Materi Pembahasan: 1. Insentif Karyawan Tahun 2024 2. Lainnya
11.	Tanggal Rapat 08 Januari 2024 Jumlah Peserta 26 orang Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Komitmen dan Tindaklanjut Rapat Kerja 22-24 November 2023 • Evaluasi Kinerja Desember Tahun 2023
12.	Tanggal Rapat 12 Februari 2024 Jumlah Peserta 32 orang Topik/Materi Pembahasan:

	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Komitmen dan Tindaklanjut Rapat Pimpinan Bulan Januari 2024 • Evaluasi Kinerja Januari 2024 	
13.	Tanggal Rapat	14 Maret 2024
	Jumlah Peserta	27 orang
	Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Komitmen dan Tindaklanjut Rapat Pimpinan Bulan Februari 2024 • Evaluasi Kinerja Februari 2024 	
14.	Tanggal Rapat	16 April 2024
	Jumlah Peserta	26 orang
	Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan Tindaklanjut Rapat Pimpinan Bulan Maret • 2024 Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 	
15.	Tanggal Rapat	17 Mei 2024
	Jumlah Peserta	35 orang
	Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan Tindaklanjut Rapat Pimpinan Bulan April 2024 • Evaluasi Kinerja Bulan April 2024 	
16.	Tanggal Rapat	19 Juni 2024
	Jumlah Peserta	34 orang
	Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan Tindaklanjut Rapat Pimpinan Bulan Mei • 2024 Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2024 	
17.	Tanggal Rapat	22 Juli 2024
	Jumlah Peserta	27 orang
	Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan Tindaklanjut Rapat Pimpinan Bulan Juni 2024 • Evaluasi Kinerja Semester 1 Tahun 2024 	
18.	Tanggal Rapat	14 Agustus 2024
	Jumlah Peserta	31 orang
	Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan Tindaklanjut Rapat Pimpinan Bulan Juli 2024 • Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2024 	

19.	Tanggal Rapat	12 September 2024
	Jumlah Peserta	32 orang
Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan Tindaklanjut Rapat Pimpinan Bulan Agustus • 2024 Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2024 		
20.	Tanggal Rapat	14 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	28 orang
Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan Tindaklanjut Rapat Pimpinan Bulan September 2024 • Evaluasi Kinerja Triuwlan 3 Tahun 2024 • Evaluasi Pengawasan dan Rekomendasi Komisaris 		
21.	Tanggal Rapat	18 November 2024
	Jumlah Peserta	45 orang
Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja Januari - Oktober • 2024 Rencana Kerja 2025 		
22.	Tanggal Rapat	19 November 2024
	Jumlah Peserta	45 orang
Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja Januari - Oktober • 2024 Rencana Kerja 2025 		
23.	Tanggal Rapat	22 November 2024
	Jumlah Peserta	32 orang
Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja Januari - Oktober • 2024 Rencana Kerja 2025 		

Pelaksanaan Rapat Pimpinan terlaksana minimal 1 (satu) kali setiap bulannya dengan agenda pembahasan perkembangan bisnis dan operasional BPR Hasamitra serta issue- issue yang berpengaruh. Pelaksanaan Rapat Pimpinan dilaksanakan secara on line (daring) dan off line pada evaluasi triwulanan, Pra Rapat Kerja dan Rapat Kerja yang dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 18 sd 22 November 2024 dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris, Direksi dan segenap Pemimpin Cabang dan Kepala Divisi.

Setiap pelaksanaan Rapat Pimpinan selalu dihadiri oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Yonggris
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	16 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Andi faisal Husni
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	23 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
3.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Livinus Rantelino
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	23 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Pelaksanaan Rapat Pimpinan terlaksana minimal 1 (satu) kali setiap bulannya dengan agenda pembahasan perkembangan bisnis dan operasional BPR Hasamitra serta issue- issue yang berpengaruh. Pelaksanaan Rapat Pimpinan dilaksanakan secara on line (daring) dan off line pada evaluasi triwulanan, Pra Rapat Kerja dan Rapat Kerja yang dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 18 sd 22 November 2024 dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris, Direksi dan segenap Pemimpin Cabang dan Kepala Divisi.

Setiap pelaksanaan Rapat Pimpinan selalu dihadiri oleh Dewan Komisaris

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	2 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	2 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	2 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	1 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	1 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	2 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Merujuk pada hasil pemeriksaan SKAI BPR Hasamitra dalam kurung waktu tahun 2024 dimana ditemukan adanya penyimpangan/kecurangan dengan meminta atau menerima fee setelah realisasi pencairan kredit yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap dan case kecurian motor diakibatkan kelalaian dari Pramubakti pada Kantor Cabang Sidrap.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1 kasus
--	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
---	---------

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	1 kasus

Pada tahun 2024, BPR Hasamitra diperhadapkan dalam suatu perkara perdata yang diajukan oleh seorang debitur terkait objek jaminan kredit berupa sertifikat hak atas tanah. Perkara ini bermula dari adanya klaim debitur yang tidak mengakui telah menerima kembali jaminannya, padahal Bank sebelumnya telah menyerahkan jaminan tersebut kepada yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Jaminan yang ditandatangani oleh debitur. Debitur mengajukan gugatan terhadap bank selaku pemberi kredit sebelumnya sebagai Tergugat I, dengan dalih bahwa sertifikat yang pernah dijaminakan kini dikuasai oleh pihak lain tanpa sepengetahuannya. Gugatan tersebut semula dicabut oleh Penggugat setelah pihak Bank memperlihatkan dan menyerahkan bukti tertulis berupa Surat Tanda Terima Jaminan. Namun, gugatan kembali diajukan oleh debitur dengan memperluas pihak tergugat, di mana PT BPR Hasamitra turut dimasukkan sebagai Turut Tergugat I, karena dalam catatan pertanahan, masih terdapat Hak Tanggungan atas nama BPR Hasamitra pada sertifikat yang disengketakan.

Selain perkara perdata di atas, pada tahun yang sama BPR Hasamitra turut terdampak dalam suatu perkara Pidana Militer, yang melibatkan seorang debitur aktif. Debitur tersebut diketahui telah mengajukan pinjaman dengan menjaminkan Surat Keputusan (SKEP) palsu sebagai pegawai militer, serta menyertakan bukti pelunasan kredit dari bank lain yang juga diduga palsu. Tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan yang masuk dalam kategori Pidana Militer, mengingat pelaku merupakan anggota aktif militer. BPR Hasamitra dalam hal ini menjadi pihak yang dirugikan secara materiil serta turut memberikan keterangan dalam proses penyidikan oleh Denpom XIV/14 Hasanuddin.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

1.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Yonggris
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Pemilik & Komisaris Utama
	Nama Pengambil Keputusan	I Nyoman Supartha
	Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur Utama
	Jenis Transaksi	Sewa Gedung Kantor BPR Hasamitra di semua cabang
	Nilai Transaksi	Rp2.247.500.000

Keterangan:

sebanyak 12 gedung yang disewa dengan Nilai sewa dalam satu tahun sebanding dengan nilai sewa bangunan sejenis di areanya.

Saat ini semua gedung kantor yang ditempati BPR Hasa Mitra berstatus sewa kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) sekaligus sebagai Komisaris Utama. Meskipun demikian Direksi tetap mengacu pada Kebijakan Internal BPR yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

Sebelum penetapan sewa, Direksi melalui bagian umum telah melakukan survei harga sebagai pembandingan atas nilai sewa dengan memperhatikan posisi gedung terhadap akses (letak strategis), luas parkir dan kualifikasi bangunan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan untuk sewa yang dimaksud di atas. Selain transaksi yang disebutkan di atas, masing-masing pengurus berikut keluarga yang terkait memiliki rekening simpanan di BPR Hasamitra, namun perlakuan transaksi yang diberikan mengacu pada ketentuan internal bank yang ada. Sehingga praktis perlakuannya sama dengan nasabah umum lainnya.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	07 Maret 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Nyepi dan Dharma Santi
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk PHDI
	Jumlah (Rp)	Rp12.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	05 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pemkot Dinas Lingkungan Hidup
	Penjelasan Kegiatan	Paket Lebaran Dinas Ling Hidup
	Jumlah (Rp)	Rp10.750.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	21 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Permabudhi Sulsel
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Waisak
	Jumlah (Rp)	Rp12.000.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	21 Juni 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	Makodim 1402 Majene
	Penjelasan Kegiatan	Kegiatan Penanaman 200 Pohon
	Jumlah (Rp)	Rp1.800.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	27 Juni 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Palang Merah Indonesia (PMI)
	Penjelasan Kegiatan	Donor Darah
	Jumlah (Rp)	Rp6.826.836
6.	Tanggal Pelaksanaan	01 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	LPDG Tingk Kota Makassar
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Lembaga Dharma Gita
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	19 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Persatuan Wartawan Indonesia Sul-Sel
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk PWI
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	12 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Hari Raya Gerejawi GT JM Masale
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Natal
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	08 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat
	Penjelasan Kegiatan	Keg Ramadhan 2024
	Jumlah (Rp)	Rp40.106.587
10.	Tanggal Pelaksanaan	18 September 2024

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SMPN 15 Barombong
	Penjelasan Kegiatan	CSR Musholla SMPN 15
	Jumlah (Rp)	Rp2.993.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	03 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	RS Syeckh Yusuf dan Panti Asuhan Yuda Mandiri
	Penjelasan Kegiatan	Paket Anjangsana
	Jumlah (Rp)	Rp4.000.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	03 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Paket Petugas Kebersihan dan Kaum Dhuafa
	Penjelasan Kegiatan	Petugas Kebersihan dan Kaum Dhuafa
	Jumlah (Rp)	Rp10.927.500
13.	Tanggal Pelaksanaan	03 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Kodim Gowa, Polres Gowa dan Depan Hasamitra Gowa
	Penjelasan Kegiatan	Bagi Takjil
	Jumlah (Rp)	Rp7.968.000
14.	Tanggal Pelaksanaan	03 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Mesjid Usman Bin Haffan, Mesjid Pattallassang Gowa
	Penjelasan Kegiatan	Bakti Sosial Mesjid
	Jumlah (Rp)	Rp484.100
15.	Tanggal Pelaksanaan	24 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	Masjid Jami Al Ikhwan Bontolangkasa,
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan ke Mesjid
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
16.	Tanggal Pelaksanaan	18 November 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Madrasah Arifah
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Madrasah Arifah Gowa
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
17.	Tanggal Pelaksanaan	13 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Ibu Bhayangkari POLRES, KODIM & BRIMOB
	Penjelasan Kegiatan	Bagi Takjil
	Jumlah (Rp)	Rp6.000.000
18.	Tanggal Pelaksanaan	13 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Songkok Recca, Masjid Raya, Masjid Al Hilal , dan Mesjid Nurulsalam
	Penjelasan Kegiatan	Bakti Kebersihan
	Jumlah (Rp)	Rp990.000
19.	Tanggal Pelaksanaan	13 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pasien RS Wahidn dan Rumah sakit Yasin
	Penjelasan Kegiatan	Paket Anjangsana
	Jumlah (Rp)	Rp1.800.000
20.	Tanggal Pelaksanaan	13 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Petugas Kebersihan (Penyapu & Motor Sampah) DLH Kab Bone
	Penjelasan Kegiatan	Sembako kepada petugas Kebersihan

	Jumlah (Rp)	Rp18.500.000
21.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Sumbangan Kegiatan Ceng Beng 202
	Penjelasan Kegiatan	warga tionghoa kota palopo
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
	Tanggal Pelaksanaan	24 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	petugas kebersihan palopo, anak panti asuhan halimatussa'diyah, mesjid raodah, pasien RS bintang laut
	Penjelasan Kegiatan	Kegiatan Ramadhan
	Jumlah (Rp)	Rp21.558.100
23.	Tanggal Pelaksanaan	14 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	warga sekitar jalan poros suli yang terdampak banjir
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Banjir Luwu
	Jumlah (Rp)	Rp5.347.950
24.	Tanggal Pelaksanaan	30 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	pengurus gereja rehoboth an. YELFIAN
	Penjelasan Kegiatan	Bakti Sosial Gereja Reho
	Jumlah (Rp)	Rp915.500
25.	Tanggal Pelaksanaan	30 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	pasien RS lakipadada
	Penjelasan Kegiatan	Anjangsana RS Lakipada
	Jumlah (Rp)	Rp994.000
26.	Tanggal Pelaksanaan	23 April 2024

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pengurus Masjid Nurul Askar Brimob dan Masjid Nurjannah Kodim Parepare
	Penjelasan Kegiatan	Pembersihan Masjid
	Jumlah (Rp)	Rp1.576.700
27.	Tanggal Pelaksanaan	23 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pasien RSUD Lasinrang Pinrang
	Penjelasan Kegiatan	Anjongsana RS Pinrang
	Jumlah (Rp)	Rp1.600.000
28.	Tanggal Pelaksanaan	23 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	masyarakat kurang mampu di parepare
	Penjelasan Kegiatan	Smbko Masyarakat kurang mampu
	Jumlah (Rp)	Rp1.441.900
29.	Tanggal Pelaksanaan	23 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pengguna Jalan di wilayah RS Sumantri dan Kantor Hasamitra Parepare
	Penjelasan Kegiatan	Bagi Takjil
	Jumlah (Rp)	Rp2.052.000
30.	Tanggal Pelaksanaan	23 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Petugas Kebersihan Kec. Ujung Parepare
	Penjelasan Kegiatan	Sembako Petugas Kebersihan
	Jumlah (Rp)	Rp6.526.900
31.	Tanggal Pelaksanaan	30 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pasien RS Fatima Parepare

	Penjelasan Kegiatan	Anjangsana RS Fatima
	Jumlah (Rp)	Rp1.634.600
32.	Tanggal Pelaksanaan	30 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pengurus Gereja Bukit Hermon Brimob Parepare
	Penjelasan Kegiatan	Baksos Gereja Bukit
	Jumlah (Rp)	Rp839.300
33.	Tanggal Pelaksanaan	29 Juni 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	masyarakat pangkep
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Ramadhan
	Jumlah (Rp)	Rp17.835.000
34.	Tanggal Pelaksanaan	21 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	GKSS Jemaat Padang Lampe
	Penjelasan Kegiatan	CSR Gereja Padang Lampe
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
35.	Tanggal Pelaksanaan	29 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bakri
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Alat Kebersihan
	Jumlah (Rp)	Rp304.000
36.	Tanggal Pelaksanaan	06 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pasien RS Arifin Nu'mang dan RS Nene Mallomo
	Penjelasan Kegiatan	Kegiatan Ramadhan 2024
	Jumlah (Rp)	Rp11.442.290

37.	Tanggal Pelaksanaan	30 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Jemaat Gereja GPIB Datae
	Penjelasan Kegiatan	Kegiatan Natal
	Jumlah (Rp)	Rp978.000
38.	Tanggal Pelaksanaan	16 Januari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	UPK Larompong Selatan
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Mesin Money Counter
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
39.	Tanggal Pelaksanaan	31 Desember 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Gereja Katolik Stasi Santa Elisabeth Sengkang
	Penjelasan Kegiatan	Baksos Ke Gereja
	Jumlah (Rp)	Rp736.000
40.	Tanggal Pelaksanaan	29 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pasien PKM Bontobangun, PKM Salassae, PKM Pabentengan
	Penjelasan Kegiatan	Paket Anjangsana
	Jumlah (Rp)	Rp2.717.300
41.	Tanggal Pelaksanaan	29 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Paket Petugas KeberSihan
	Penjelasan Kegiatan	Anggota Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah (Rp)	Rp3.318.200
42.	Tanggal Pelaksanaan	29 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat umum sekitar kota Bulukumba

	Penjelasan Kegiatan	Bagi Takjil
	Jumlah (Rp)	Rp8.023.700
43.	Tanggal Pelaksanaan	29 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Mesjid Mauzah, Mesjid Miftahul Jannah, Mesjid Nur
	Penjelasan Kegiatan	Bakti Sosial Mesjid
	Jumlah (Rp)	Rp990.100
44.	Tanggal Pelaksanaan	29 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Sumbangan Kaum Dhuafa An. Nenek Bola
	Penjelasan Kegiatan	Bakti Sosial Kaum Dhuafa
	Jumlah (Rp)	Rp3.220.100

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR Hasamitra untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 22 Maret 2024

PT BPR Hasamitra

Disetujui


I Nyoman Supartha
Direktur Utama

 **hasamitra**
bank perekonomian rakyat


Yonnggris
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Hasamitra

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933793-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-602070-02052025152156

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

div.akuntingpelaporan@hasamitra.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-05-02 15:21:56



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.